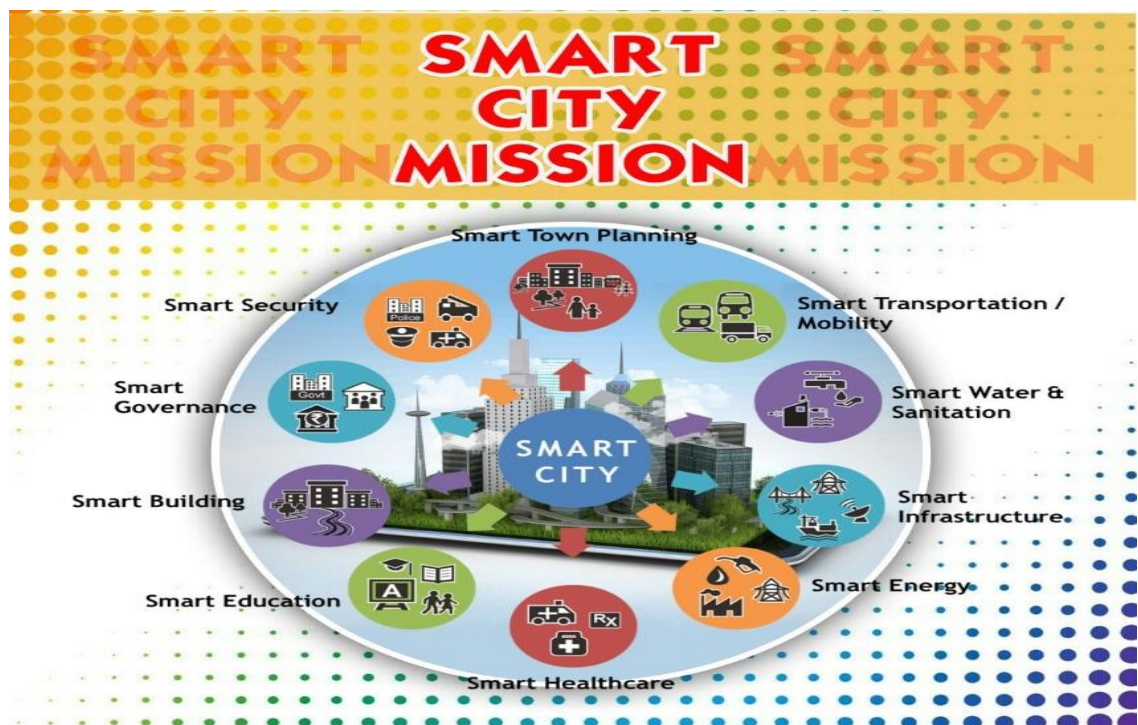




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan demi penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika ke depannya.

Tanjungpinang, Maret 2024

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang



TEGUH SUSANTO, S.T.
Pemda Kota
NIP. 19740707 200604 1 007



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum	6
C.	Isu Strategis yang Dihadapi.....	7
D.	Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.	Rencana Strategis Tahun 2018-2023	10
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Kinerja OPD	16
B.	Realisasi Anggaran	41

BAB IV PENUTUP

45

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem bertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ditebitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran target yang telah ditetapkan.

1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang merupakan dinas yang baru terbentuk dan berfungsi pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam bidang Komunikasi dan Informatika, untuk menjalani tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

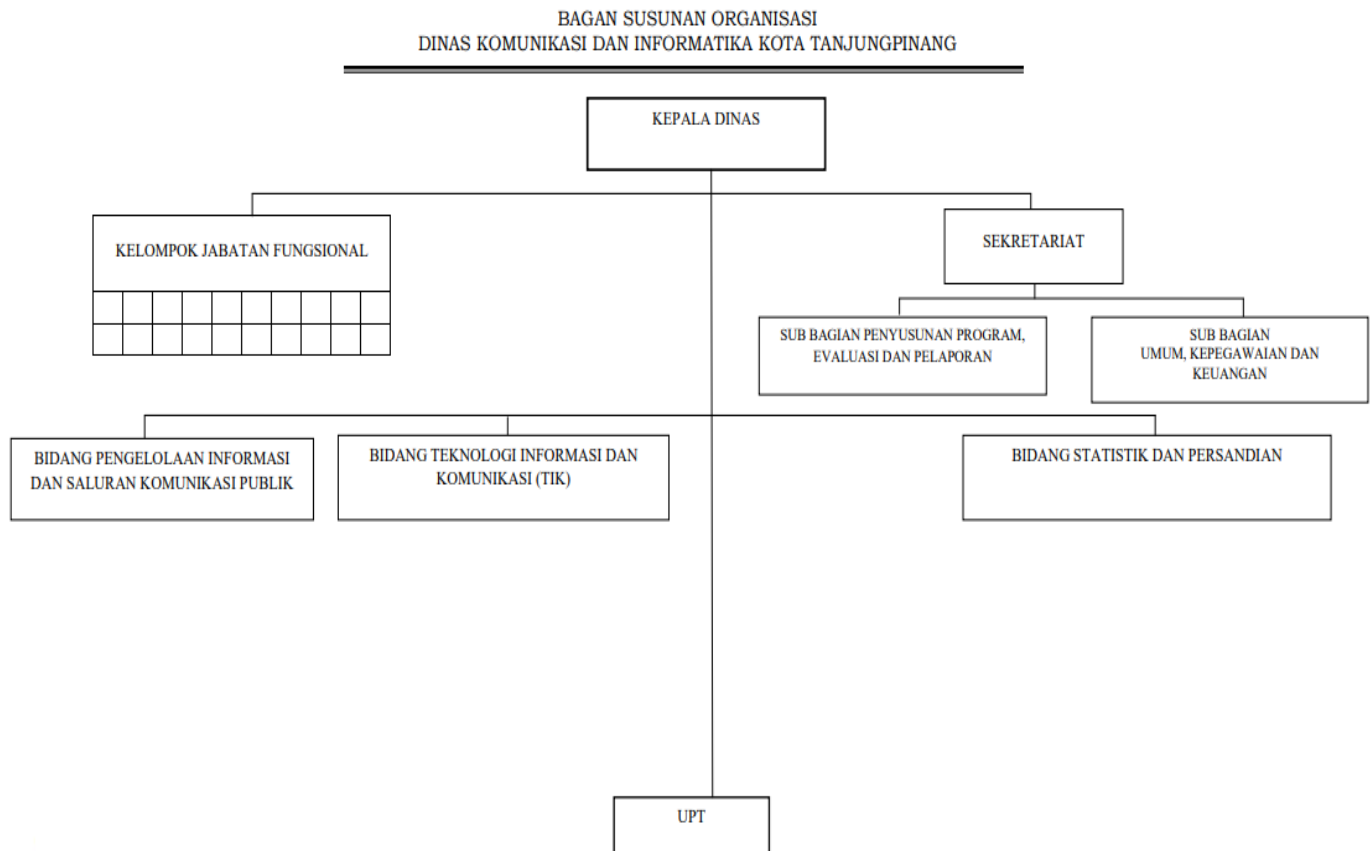
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
5. Bidang Statistik dan Persandian

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dapat dilihat pada gambar dibawah :



Gambar 1.1
Struktur Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang



2. Kepegawaian

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memiliki pegawai sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Yang terdiri dari ASN berjumlah sebanyak 36 orang, Pegawai Tidak Tetap berjumlah sebanyak 17 orang. Untuk ASN terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon IIIb) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon IIIa) sebanyak 3 orang, Kepala Subbagian (Eselon IV) sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Penyetaraan 7 orang (Analis Kebijakan Ahli Muda : 5 orang, Pranata Komputer Ahli Muda : 2 orang, serta Jabatan Fungsional Umum (ASN Non Eselon) sebanyak 22 orang. Selain pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota



Tanjungpinang juga dibantu oleh 17 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang terdiri dari PTT Daerah sebanyak 7 orang dan PTT Kantor 10 orang.

Tabel 1.1
Komposisi ASN Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Jabatan Fungsional Penyetaraan dan Kasubbag				2	7		9
5	Staf						22	22
	Jumlah	0	1	4	2	7	22	36

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk melihat apakah diperlukan penambahan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang		1	2			3
4	Jabatan Fungsional Penyetaraan dan Kasubbag			9			9
5	Staf			12	5	5	22
	Jumlah	0	2	24	5	5	36



Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honor Kantor
berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S 1	8
2	D III	-
3	SLTA	9
4	SLTP	-
	Jumlah	17

B. Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berpedoman kepada dasar hukum yang berlaku terkait penyusunan dan pelaporan LKIP. Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.



8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

C. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah Daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, media dan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, beberapa isu sudah dirumuskan didalam Renstra 2018-2023, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Tanjungpinang, isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah:

1. Banyaknya aplikasi e-Government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.



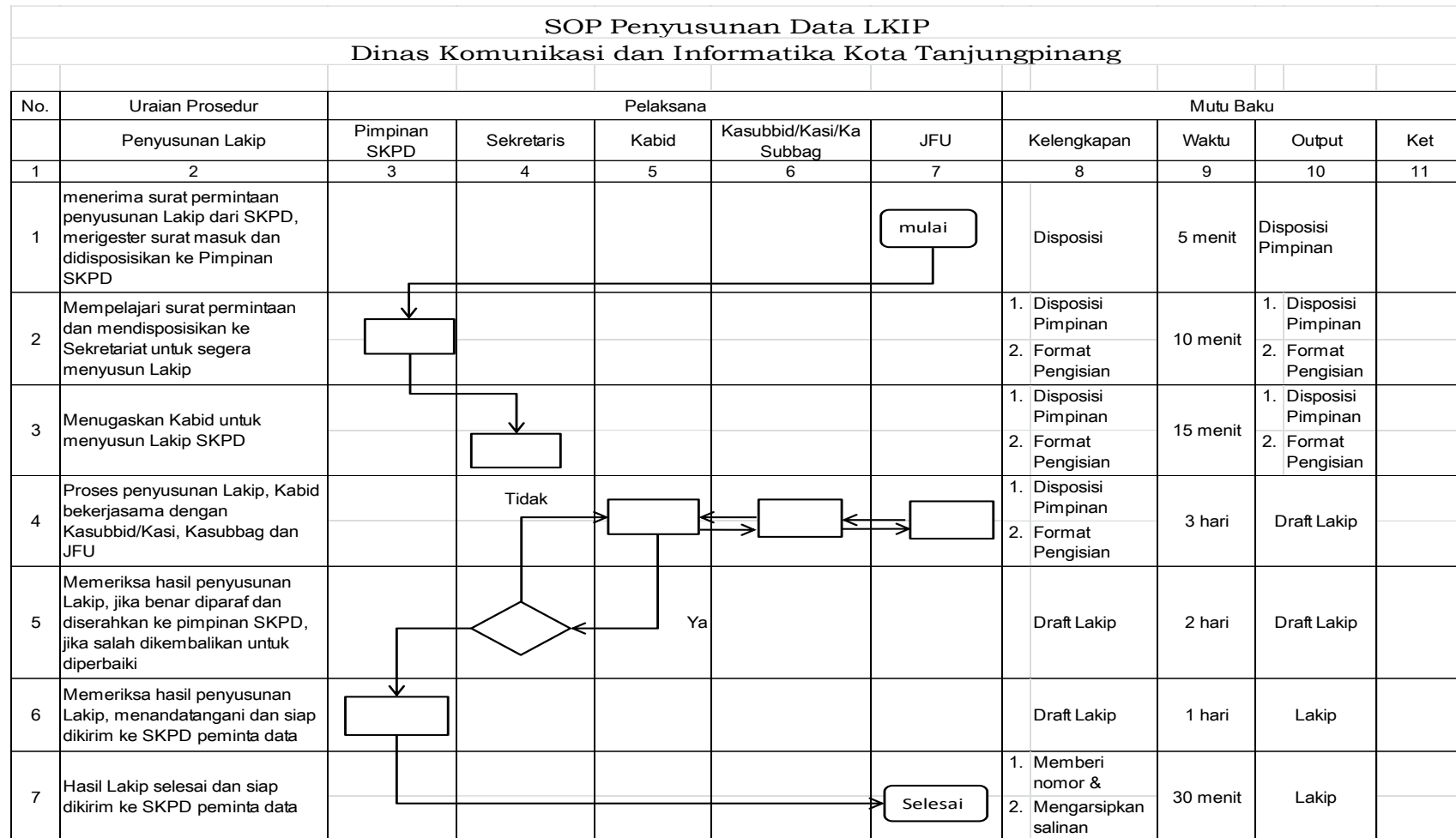
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
4. Belum terbangunnya sistem big data (satu data).
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dan penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

D. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai acuan. SOP ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja, serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review kemudian hari sesuai dengan kebutuhan percepatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



Gambar 1.2





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

1. Visi

Visi sebagai salah satu dari perencanaan strategis yang dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang mendukung visi tersebut. Adapun Visi Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 adalah :

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

2. Misi

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi : Kota Maju. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi



ke- 4 yaitu : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten dengan **Tujuan** meningkatkan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah daerah dan **Sasaran** meningkatnya penerapan E-government.

3. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai / diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah :

"Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik"

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tersebut memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Dan indikator dari tujuan tersebut adalah : **Indeks SPBE.**

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah



yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, adapun Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika.
2. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah.
4. Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi.
5. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan OPD dalam mencapai sasaran strategis OPD. Adapun indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi.
2. Persentase OPD yang Mengimplementasikan IT dengan Baik.
3. Persentase OPD yang Melakukan Keterbukaan Informasi Publik.
4. Persentase Dokumen Statistik Sektorial yang Dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat.
5. Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi.
6. Persentase layanan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut dibawah ini :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% Sistem elektronik yang terintegrasi	Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi/Jumlah sistem elektronik yang ada x 100%
		% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	Jumlah OPD yang Mengimplemetasikan IT dengan baik/Jumlah OPD x 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik/jumlah OPD x 100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat/Jumlah Dokumen statistik sektoral yang disusun x 100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi/jumlah OPD x 100%
5.	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Pemerintah	% Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Layanan Pemerintah yang diterima dikali 100%



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi dengan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Berikut tabel 2.2 yang merupakan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	100%
		Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	100%



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1. 979.377.200	APBD
2. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.193.750.000	APBD
3. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 147.400.000	APBD
4. Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 21.300.000	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OPD

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi kepala daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar mencapai hasil kinerja yang baik maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :



Tabel 3.1
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%	100,00%	100%
		Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	100%	76,92%	76,92%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	100%	100%	100%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan, yaitu dengan rata-rata persentase capaian 100%. Sedangkan ada 1 indikator yang realisasi kinerjanya belum mencapai target yaitu Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi, indikator ini masuk dalam sasaran Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika. Realisasi yang dicapai hanya 76,92% dengan target sebesar 100%, sehingga capaiannya hanya 76,92%.

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas, bahwasanya Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun terakhir dalam Perencanaan Pembangunan telah mengalami peningkatan dalam beberapa hal diantaranya adalah pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hanya saja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dianggap perlu melakukan selalu monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.



Selain itu, Pengelolaan statistik sektoral yang sudah mengalami peningkatan, akan tetapi perlu dilakukan pemutkahiran data setiap tahunnya untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi dalam hal pengumpulan data statistik sektoral untuk mencapai Satu Data Indonesia (SDI).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2020 sampai dengan 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2020 sampai dengan tahun 2022), dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :



Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIA	TARGET	REALISASI	CAPAIA	TARGET	REALISASI	CAPAIA	TARGET	REALISASI	CAPAIA
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	44,12%	44,12%	100%	58,82%	58,82%	100%	73,53%	73,53%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	40%	12,24%	30,61%	69,14%	62,50%	90,40%	80,00%	76,92%	96,15%	100,00%	76,92%	76,92%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	50%	50%	100%	70%	70%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	44,12%	9,09%	20,60%	58,82%	14,71%	25%	88,24%	94,12%	107%	100%	100%	100%



Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dan hasil capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dimana pada tahun 2020 ada 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya telah mencapai 100%, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum mencapai 100%, yaitu indikator Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi yang hanya mencapai 30,61% dan indikator Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi yang hanya mencapai 20,60%. Kemudian di tahun 2021, kondisi yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang masih sama seperti tahun 2020, dimana 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai 100% dan 2 (dua) indikator masih belum mencapai 100%. Akan tetapi ditahun 2021 2 (dua) indikator yang belum mencapai target mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Sedangkan di Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan, dimana terdapat 4 (empat) indikator yang telah mencapai target. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah indikator Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informas yaitu dari capaian sebesar 25% (tahun 2021) meningkat menjadi 107%, dimana realisasi melebihi dari target yang telah direncanakan. Dan indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi yang hanya mencapai 96,15%.

Ditahun 2023, Kondisi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sama seperti kondisi di tahun 2022. Yaitu dimana ada 4 (empat) indikator kinerja yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target. Satu indikator kinerja yang tidak mencapai target sama seperti tahun 2022 yaitu indikator Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi, yaitu dengan capaian sebesar 76,92%.



Di tahun 2023, indikator tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan target yang direncanakan lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Sedangkan realisasinya antara tahun 2022 dengan 2023 sama atau tidak mengalami perubahan, sehingga mempengaruhi hasil capaiannya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan tiap tahun nya dari masing-masing indikator. Meskipun masih ada indikator kinerja yang tidak mencapai target, tetapi indikator tersebut masih mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat di lihat pada point Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :



Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka
Menengah Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET JANGKA MENENGAH					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	29,41%	29,14%	44,12%	58,82%	73,53%	100%	29,14%	44,12%	58,82%	73,53%	100%
		% sistem elektronik yang terintegrasi	-	29,63%	41,98%	69,14%	80%	100%	-	12,24%	66,67%	76,92%	76,92%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	-	40%	50%	70%	80%	100%	40%	50%	70%	80%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	-	29%	44%	59%	88%	100%	5%	9,09%	14,71%	94,12%	100%

Jika dilihat tabel diatas, dapat disampaikan bahwa perbandingan antara target jangka menengah dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai ke 2023. Hanya saja ada 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu Indikator Persentase sistem elektronik yang terintegrasi. Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan adanya beberapa faktor, diantaranya kurang optimalnya sumber daya manusia yang tersedia dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

a. Sasaran Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika

Pada sasaran ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu :

I. Persentase OPD yang Mengimplementasikan IT Dengan Baik

Indikator kinerja ini memiliki rumus atau formula indikator sebagai berikut :



Jumlah OPD yang Mengimplematisasikan IT dengan baik dibagi jumlah OPD dikali 100%

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 32 (tiga puluh dua) OPD dan di tahun 2023, seluruh Perangkat Daerah telah mengimplementasikan IT dengan baik. Sehingga capaian kinerjanya pada indikator ini telah mencapai target yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang setiap tahunnya ke seluruh OPD dengan memonitoring dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana IT. Dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2023, OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik mengalami peningkatan. Hal-hal yang dimonitoring adalah jaringan internet dan penggunaan aplikasi umum serta penggunaan website di setiap perangkat daerah. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan pendampingan kepada OPD yang ingin membangun aplikasi atau website baru. Sehingga nanti nya aplikasi atau website yang dibangun dapat diintegrasikan ke pusat data yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut tabel 3.4 yang menampilkan data perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik :

Tabel 3.4
Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan IT dengan Baik

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN IT	KET
1	Sekretariat Daerah	✓	Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	✓	Baik
3	Inspektorat Daerah	✓	Baik



4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	✓	Baik
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	✓	Baik
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	✓	Baik
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	Baik
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓	Baik
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓	Baik
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	Baik
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	✓	Baik
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	✓	Baik
13	Dinas Sosial	✓	Baik
14	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	✓	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	✓	Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	✓	Baik
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	Baik
18	Dinas Perhubungan	✓	Baik
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	Baik
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓	Baik
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	✓	Baik
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	Baik
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	Baik



24	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	✓	Baik
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	Baik
26	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	✓	Baik
27	Dinas Pendidikan	✓	Baik
28	Satuan Polisi Pamong Praja	✓	Baik
29	Kecamatan Tanjungpinang Kota	✓	Baik
30	Kecamatan Tanjungpinang Barat	✓	Baik
31	Kecamatan Tanjungpinang Timur	✓	Baik
32	Kecamatan Bukit Bestari	✓	Baik

Solusi alternatif yang harus dilaksanakan adalah :

- Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM dalam hal pengelolaan informasi dan teknologi.
- Melaksanakan pendampingan kepada OPD yang akan membangun aplikasi dan website.
- Meningkatkan layanan pengelolaan jaringan intranet di Lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

I. Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi

Indikator kinerja ini memiliki rumus atau formula indikator sebagai berikut :

Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dibagi

Jumlah sistem elektronik yang ada dikali 100%

Di tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi mengalami penurunan yaitu sebesar 19,23%, yaitu dari capaian tahun sebelumnya sebesar 96,15% di tahun 2023 turun menjadi 76,92%. Hal ini dikarenakan, target di tahun 2023 direncanakan sebesar 100% sedangkan di tahun 2022 sebesar 80%. Realisasi yang dicapai



oleh Dinas Komunikasi dan informatika pada tahun 2022 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar 76,92%. Sehingga membuat penurunan pada capaian kerjanya.

Jumlah Sistem Elektronik yang terdata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Jumlah Sistem Elektronik Pemerintah Kota
Tanjungpinang

NO	SISTEM ELEKTRONIK	NAMA DOMAIN	INTEGRASI / TIDAK INTEGRASI
	Sistem Informasi Aktivitas Presensi (SIAP)	siap.tanjungpinangkota.go.id	✓
2	Sistem Informasi Pendataan Aplikasi	sipa.kominfo.tanjungpinangkota.go.id	✓
3	SIPBOS Kota Tanjungpinang	sipbos-tanjungpinang.id	x
4	SIPPDB (Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota Tanjungpinang	sippdb-tanjungpinang.com	x
5	Website Portal OPD	disdik.tanjungpinangkota.go.id	x
6	Website DPMPTSP dan MPP	dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id	✓
7	e-BPHTB	ebphtp.bpprdkotatanjungpinang.online	✓
8	KSWP	kswp.bpprdkotatanjungpinang.online/login	✓
9	INCOMEPOINT	incomepoint.bpprdkotatanjungpinang.online	✓
10	PBB Online	pbb.bpprdkotatanjungpinang.online	✓
11	Gerai Tani'e	geraitanie.com	✓



12	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	esakip.tanjungpinangkota.go.id	✓
13	Website Portal DP3APM	dp3apm.tanjungpinangkota.go.id	x
14	Sistem Informasi Arsip Tanah	simarta.kecbukitbestari.tanjungpinangkota.go.id	x
15	E-Puskesmas	tanjungpiannng.epuskesmas.id	✓
16	Website Support Mall Pelayanan Publik	apimpp.tanjungpinangkota.go.id	✓
17	Website MPP	mpp.tanjungpinangkota.go.id	✓
18	Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (SIKANCIL)	sikancil-disdukcapil.tanjungpinangkota.go.id	x
19	SIMPEG	-	x
20	JAVIDCON	javidcon.tanjungpinangkota.go.id	✓
21	Digital Up Skill	digitalupskill.tanjungpinangkota.go.id	✓
22	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	siharka.menpan.go.id	✓
23	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	elhkpn.kpk.go.id	✓
24	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	inpresp4gn.bnn.go.id	✓
25	SIBIJAK	sibijak.bpkp.go.id	✓
26	Website Portal DLH	dlh.tanjungpinangkota.go.id	x
27	E-SAKIP	esakip.tanjungpinangkota.go.id	x



28	Sistem informasi Manajemen hasil Pengawasan (SIMHP)		✓
29	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Temuan (SIPTL)	-	✓
30	SIMDA Keuangan		✓
31	SIMDA BMD		✓
32	JDIH Kota Tanjungpinang	jdih.tanjungpinangkota.go.id	✓
33	Siap Tindak	https://siaptindak.satpolpp.tanjungpinangkota.go.id/	✓
34	Portal Open Data Tanjungpinang	opendata.tanjungpinangkota.go.id	✓
35	Integrated Content Manajemen Sistem (ICMS)	icms.tanjungpinangkota.go.id	✓
36	Tanjungpinang Aktual		✓
37	Website PPID Kota Tanjungpinang	ppid.tanjungpinangkota.go.id	✓
38	Email Kedinasan Kota Tanjungpinang	mail.tanjungpinangkota.go.id	✓
39	Website Portal Pemerintah Kota Tanjungpinang	tanjungpinangkota.go.id	✓

Dari tabel diatas jumlah sistem elektornik yang terintegrasi sampai dengan tahun 2023 hanya sebanyak 30 (tiga puluh) sistem elektronik dari 39 (tiga puluh sembilan) sistem elektronik. Data yang masuk merupakan data yang direkap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari hasil monitoring yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Infomatika, belum tercapainya target yang telah ditentukan



dikarenakan adanya perbedaan sistem elektronik yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Masing-masing sistem yang dibangun belum sepenuhnya mendukung dan menyediakan mekanisme integrasi sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Solusi alternatif yang harus dilaksanakan adalah mengembangkan sistem penghubung layanan integrasi sistem elektronik atau aplikasi serta menyusun peraturan teknis mengenai layanan integrasi sistem elektronik.

b. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Pada sasaran ini, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu :

- I. Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik
Indikator kinerja ini memiliki rumus atau formula indikator sebagai berikut :

Jumlah OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik dibagi jumlah OPD dikali 100%

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini di tahun 2023 mengalami capaian yang optimal. Dimana realisasi kinerja nya adalah 100% dan targetnya adalah 100%, sehingga capaian kinerja nya mencapai 100%. Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan jumlah perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) OPD telah melakukan Keterbukaan Informasi Publik.

Hal yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendapatkan realisasi yang maksimal yaitu dengan melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat mengenai informasi Kebijakan dan Program Pemerintah Kota Tanjungpinang, dimana informasi Kebijakan dan Program tersebut tentunya didapat dari masing-masing OPD yang di Lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selain daripada



penyebaran informasi, OPD yang telah melakukan Keterbukaan Informasi Publik, juga dapat dilihat dari peran aktif OPD dalam mengelola pelayanan informasi publik, yaitu dengan terbentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana di seluruh OPD. Hal ini dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan melaksanakan koordinasi dengan OPD dalam hal penyampaian informasi yang akan diinput dalam website PPID. Selain itu hal yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah layanan pengaduan masyarakat, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yaitu SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Sistem informasi ini merupakan sistem informasi pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik masyarakat yang terintegrasi secara Nasional. Artinya, masyarakat bisa melakukan pengaduan tentang layanan publik kepada pemerintah melalui sistem informasi ini. Yang kemudian pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk di sampaikan ke Perangkat Daerah yang menjadi pengaduan dari masyarakat tersebut, agar pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah tersebut. Maka dari itu diperlukan peran aktif dari masing-masing perangkat daerah untuk dapat segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

Solusi untuk mempertahankan kinerja ini agar tetap mendapatkan capaian yang baik, maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :



- Melaksanakan monitoring dan evaluasi perihal informasi yang akan disampaikan ke masyarakat melalui layanan PPID.
- Meningkatkan pengelolaan konten atau berita yang akan disampaikan ke masyarakat.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! ke seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

c. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah

Pada sasaran ini, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu :

I. Persentase Dokumen Statistik Sektorial yang Dimanfaatkan Oleh OPD dan Masyarakat

Indikator kinerja ini memiliki rumus atau formula indikator sebagai berikut :

Jumlah dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dibagi Jumlah Dokumen statistik sektoral yang disusun dikali 100%

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja yang dicapai pada indikator ini adalah 100% dan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian nya adalah 100%. Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atas kinerja ini adalah karena Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen statistik sebanyak 75 dokumen, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut disebarkan ke seluruh OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota serta Unit-Unit Pelayanan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Solusi alternatif yang dilaksanakan untuk tetap mempertahankan keberhasilan tersebut adalah dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota



Tanjungpinang. Dan juga dapat meningkatkan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI).

d. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi

Pada sasaran ini, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu :

I. Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi

Indikator kinerja ini memiliki rumus atau formula indikator sebagai berikut :

Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi dibagi jumlah OPD dikali 100%

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini di tahun 2023 mengalami capaian yang optimal. Dimana realisasi kinerja nya adalah 100% dan targetnya adalah 100%, sehingga capaian kinerja nya mencapai 100%. Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan jumlah perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) OPD telah memanfaatkan sistem pengamanan informasi. Hal ini merupakan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan pemanfaatan sistem persandian dalam pengamanan informasi. Hal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan BSSN RI untuk pengelolaan persandian dalam pengamanan informasi. Salah satunya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses percepatan Layanan Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka sebanyak 32



(tiga puluh dua) OPD telah memanfaatkan sistem pengamanan informasi.

- Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang telah menerbitkan Peraturan Daerah yaitu berupa Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Perwako ini disusun dalam rangka melindungi informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai upaya pengamanan melalui pelaksanaan Persandian. Salah satunya adalah tersedianya Layanan Keamanan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Layanan, yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negera pada Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Solusi alternatif yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam rangka mempertahankan capaian yang telah diperoleh adalah dengan meningkatkan layanan pengamanan informasi kepada setiap Perangkat Daerah serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan persandian dalam pengamanan informasi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan dari perbandingan Capaian Indikator Kinerja dan Capaian Penyerapan Anggaran pada Tahun 2023. Anggaran tersebut berisikan Program-Program yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :



Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100	100%	100%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp4.240.050.000	Rp 4.182.661.778	98,65%	1,35%
	Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	100	76,92%	76,92%		Rp 43.700.000	Rp 25.250.000	57,78%	19,14%
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp3.345.982.000	Rp 3.316.850.991	99,13%	0,87%
Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% Data Pembangunan Daerah Yang Tersedia	80%	80%	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 147.400.000	Rp 145.813.600	98,92%	1,08%
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 21.300.000	Rp 20.407.300	95,81%	4,19%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terdapat efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini terlihat dari masing-masing indikator kinerja memiliki Tingkat Efisiensi positif, artinya untuk mencapai realisasi kinerja tersebut, tidak perlu menghabiskan seluruh anggaran yang ada sehingga bisa melakukan efisiensi anggaran.

Hal ini menjadi evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk kedepannya agar lebih matang dalam menyusun Perencanaan Anggaran. Hal ini dimaksudkan agar, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya Kinerja Sasaran bisa menggunakan Sumber Daya yang lebih baik tanpa harus menganggarkan anggaran yang banyak. Dan ini menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, agar ke depannya untuk dapat menyusun indikator kinerja yang lebih baik lagi dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



Tabel 3.7
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Renstra Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			%
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika Dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%	100%	100%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4.240.050.000	Rp 4.182.661.778	98,65%
						Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.138.500.000	Rp 4.085.730.153	98,72%
						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 138.500.000	Rp 128.545.360	92,81%
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 4.000.000.000	Rp 3.957.184.793	98,93%
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 101.550.000	Rp 96.931.625	95,45%
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 101.550.000	Rp 96.931.625	95,45%
	% sistem elektronik yang terintegrasi		100%	76,92%	76,92%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 43.700.000	Rp 25.250.000	57,78%
						Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 43.700.000	Rp 25.250.000	57,78%
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 43.700.000	Rp 25.250.000	57,78%
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.345.982.000	Rp 3.316.850.991	99,13%
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.345.982.000	Rp 3.316.850.991	99,13%
						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 25.753.200	Rp 23.242.900	90,25%
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 2.890.648.800	Rp 2.877.362.000	99,54%
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 236.600.000	Rp 234.353.000	99,05%
						Pelayanan Informasi Publik	Rp 7.800.000	Rp 7.620.000	97,69%
						Layanan Hubungan Media	Rp 143.130.000	Rp 132.596.250	0,00%
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp -	Rp -	0,00%
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 42.050.000	Rp 41.676.841	99,11%



	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	80%	80%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	147.400.000	Rp	145.813.600	98,92%
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	147.400.000	Rp	145.813.600	98,92%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp	147.400.000	Rp	145.813.600	98,92%
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	88,24%	88,24%	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASIL	Rp	21.300.000	Rp	20.407.300	95,81%
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotad	Rp	21.300.000	Rp	20.407.300	95,81%
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21.300.000	Rp	20.407.300	95,81%



6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Di tahun 2023, terdapat 4 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Pada masing-masing program, memiliki capaian kinerja dan hampir semua indikator pada masing-masing program telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :



Tabel 3.7
Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	13	14	15	2	3	13	14	15
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase domain dan sub domain yang telah dimanfaatkan	100%	96,73%	96,73%
		Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	100,00%	76,92%	76,92%		Persentase OPD yang terkoneksi intranet	100%	100%	100%
							Persentase ruang publik yang terkoneksi internet	100%	36,67%	36,67%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	Prgram Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%
							Persentase media yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi	87,23%	95,74%	109,76%
							Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data pembangunan daerah yang tersedia	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	25%	25%	100%
							Persentase Berita Sandi yang diamankan	25%	25%	100%

Dari tabel diatas, dapat disampaikan bahwa, Program-Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang hampir semuanya mendukung tercapainya Sasaran Kinerja yang tertera dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Hal tersebut dapat dilihat dari persentase capaian program, dimana semua capaian program memperoleh predikat sangat tinggi. Meskipun ada 1 (satu) Indikator pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang memperoleh predikat sangat rendah, yaitu Persentase Ruang Publik yang Terkoneksi Internet. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya infrastruktur milik pemerintah yang dapat mengakomodir terlaksanannya percepatan penyebaran internet di ruang publik, sehingga saat ini menggunakan infrastruktur dari



penyedia yang berimbas besarnya anggaran serta tinggi nya target yang ditentukan, sehingga anggarannya tidak dapat optimal.

Meskipun capaian indikator program tersebut sangat rendah, hal tersebut tidak menunjang tercapainya Kinerja Sasaran, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara indikator program dengan indikator sasaran. Hal ini akan menjadi evaluasi kedepannya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun atau membuat indikator kinerja.

Sedangkan untuk melihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja Program dan Anggaran tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :



Tabel 3.8
Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2022			2023			PROGRAM TAHUN 2022				PROGRAM TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Pengelolaan Aplikasi Informatika (2020-2023) / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (2019) dan Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi (2019)	Persentase domain dan sub domain yang telah dimanfaatkan	100	113%	113%	100	96,73%	96,73%	Program Aplikasi Informatika	Rp 212.893.700	Rp -	0,00%	Program Aplikasi Informatika	Rp 138.500.000	Rp 128.545.360	92,81%
		Persentase OPD yang terkoneksi intranet	100	25%	25%	100	100%	100%		Rp -	Rp -	0,00%		Rp 4.000.000.000	Rp 3.957.184.793	98,93%
		Persentase ruang publik yang terkoneksi internet	100	26,67%	26,67%	100	36,37%	36,37%		Rp 281.675.000	Rp -	0,00%		Rp 145.250.000	Rp 122.181.625	84,12%
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (2019-2023) / Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi (2019)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 36.121.990	Rp 34.495.871	95,50%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp -	Rp -	0,00%
		Persentase media yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi	86,17%	86,17%	100,00%	87,23%	95,74%	109,76%		Rp 1.288.086.000	Rp 1.278.492.196	99,26%		Rp 3.312.428.800	Rp 3.285.988.091	99,20%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	90%	100,00%	100%	100%	100,00%		Rp 37.400.000	Rp 32.110.600	85,86%		Rp 25.753.200	Rp 23.242.900	90,25%
Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Tahun 2020 - 2023) / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah (Tahun 2019)	% Data Pembangunan Daerah Yang Tersedia	80%	80%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp 112.708.000	Rp 111.899.520	99,28%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp 147.400.000	Rp 145.813.600	98,92%
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Tahun 2020 - 2023) / Program Pembinaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persandian (Tahun 2019)	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	25%	25%	100%	25%	25%	100%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 26.240.100	Rp 23.705.642	90,34%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 21.300.000	Rp 20.407.300	95,81%
		Persentase Berita Sandi yang diamankan	25%	25%	100%	25%	25%	100%								



B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memiliki tujuan untuk Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun besaran APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.426.660.187,- setelah perubahan menjadi Rp. Rp14.398.917.336,-. Pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,87%. Hal dikarenakan adanya belanja yang harus dilakukan penambahan yaitu pada belanja gaji dan tunjangan ASN serta anggaran belanja publikasi.

Pada Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 telah diberlakukan, sehingga membuat perubahan pada struktur anggaran Pemerintah Daerah, yang mana sebelumnya, struktur anggaran belanja terbagi menjadi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dimana Belanja Tidak Langsung berkaitan dengan Belanja Pegawai sedangkan Belanja Langsung berkaitan dengan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dengan berlakunya Permendagri tersebut, maka struktur anggaran belanja menjadi satu yaitu Belanja Daerah, berkaitan dengan semua anggaran belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Secara rinci, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
BELANJA DAERAH	Rp 12.426.660.187	Rp 14.398.917.336	Rp 1.972.257.149	15,87%
BELANJA OPERASI	Rp 12.021.702.087	Rp 13.946.782.236	Rp 1.925.080.149	16,01%
Belanja Pegawai	Rp 4.628.560.397	Rp 5.141.096.538	Rp 512.536.141	11,07%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.393.141.690	Rp 8.805.685.698	Rp 1.412.544.008	19,11%
BELANJA MODAL	Rp 404.958.100	Rp 452.135.100	Rp 47.177.000	11,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 382.950.100	Rp 430.127.100	Rp 47.177.000	12,32%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 22.008.000	Rp 22.008.000	Rp -	0,00%
Surplus / (Defisit)	Rp(12.426.660.187)	Rp(14.398.917.336)	Rp 1.972.257.149	15,87%



Rincian realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.600.485.336	Rp 6.220.700.801	94,25%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.803.400	Rp 19.010.307	91,38%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.803.400	Rp 14.033.178	88,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.977.129	99,54%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.141.096.538	Rp 4.919.433.216	95,69%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.141.096.538	Rp 4.919.433.216	95,69%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 31.680.000	Rp 30.100.000	95,01%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 10.800.000	Rp 10.220.000	94,63%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.880.000	Rp 19.880.000	95,21%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 586.399.170	Rp 471.073.407	80,33%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.000.000	Rp 13.162.200	87,75%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 137.182.500	Rp 136.125.000	99,23%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 34.600.000	Rp 30.905.700	89,32%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 95.131.000	Rp 83.676.900	87,96%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 114.163.270	Rp 85.144.600	74,58%
	Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.000.000	Rp 9.983.250	99,83%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 180.322.400	Rp 112.075.757	62,15%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 215.764.100	Rp 210.833.000	97,71%
	Pengadaan Mebel	Rp 49.924.600	Rp 49.330.000	98,81%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 51.500.000	Rp 50.705.000	98,46%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 114.339.500	Rp 110.798.000	96,90%



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 384.692.128	Rp 358.195.271	93,11%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 381.092.128	Rp 354.595.271	93,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 220.050.000	Rp 212.055.600	96,37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 172.000.000	Rp 164.431.000	95,60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 48.050.000	Rp 47.624.600	99,11%
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.345.982.000	Rp 3.316.850.991	99,13%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.345.982.000	Rp 3.316.850.991	99,13%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 25.753.200	Rp 23.242.900	90,25%
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 2.890.648.800	Rp 2.877.362.000	99,54%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 236.600.000	Rp 234.353.000	99,05%
	Pelayanan Informasi Publik	Rp 7.800.000	Rp 7.620.000	97,69%
	Layanan Hubungan Media	Rp 143.130.000	Rp 132.596.250	92,64%
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp -	Rp -	0,00%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 42.050.000	Rp 41.676.841	99,11%
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4.283.750.000	Rp 4.207.911.778	98,23%
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.138.500.000	Rp 4.085.730.153	98,72%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 138.500.000	Rp 128.545.360	92,81%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 4.000.000.000	Rp 3.957.184.793	98,93%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 145.250.000	Rp 122.181.625	84,12%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 43.700.000	Rp 25.250.000	57,78%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 101.550.000	Rp 96.931.625	95,45%



4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 147.400.000	Rp 145.813.600	98,92%
	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 147.400.000	Rp 145.813.600	98,92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Rp 147.400.000	Rp 145.813.600	98,92%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 21.300.000	Rp 20.407.300	95,81%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.300.000	Rp 20.407.300	95,81%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.300.000	Rp 20.407.300	95,81%
TOTAL		Rp 14.398.917.336	Rp 13.911.684.470	96,62%

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas dapat disampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang telah menganggarkan anggaran sampai dengan APBD Perubahan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.398.917.336,-. Sedangkan untuk realisasinya adalah sebesar Rp. 13.911.684.470,-. Hal ini menunjukkan penyerapan anggarannya telah mencapai 96,62% dengan Silpa dari sebesar Rp. 487.232.866,-. Dari data tersebut, ada 1 (satu) Sub Kegiatan yang digeser anggarannya karena dianggap tidak terlalu penting untuk dilaksanakan di tahun 2023, pergeserannya ditujukan untuk sub kegiatan yang dianggap perlu dilakukan penambahan karena kurangnya anggaran.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Adapun Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk kedepannya dinas kominfo akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Akan melaksanakan pendampingan kepada OPD yang ingin membangun aplikasi atau website baru, sehingga nanti nya aplikasi atau website yang dibangun dapat diintegrasikan ke pusat data yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Akan memberikan layanan pengelolaan jaringan intranet di Lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga OPD akan lebih mudah memperoleh akses internet yang lebih cepat.
3. Mengembangkan sistem penghubung layanan integrasi sistem elektronik atau aplikasi serta menyusun peraturan teknis mengenai layanan integrasi sistem elektronik.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perihal informasi yang akan disampaikan ke masyarakat melalui layanan PPID.
5. Meningkatkan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI).



6. Meningkatkan layanan pengamanan informasi kepada setiap Perangkat Daerah serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan persandian dalam pengamanan informasi.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Maret 2024

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang


TEGUH SUSANTO, S.T.
Pembina Tk. I

NIP. 19740707 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH SUSANTO, S.T.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

TEGUH SUSANTO, S.T.
NIP. 19740707 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	100%
		Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	Persentase dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.979.377.200	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 4.193.750.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 147.400.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 21.300.000	APBD

Walikota Tanjungpinang



Hj. RAHMA, S.I.P., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang



TEGUH SUSANTO, S.T.
NIP. 19740707 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SOEMANTRI**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH SUSANTO, S.T.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,

(Drs. SOEMANTRI)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Kebutuhan	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.803.400	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.628.560.397	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 31.680.000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 606.399.170	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 173.564.100	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 383.825.920	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 240.000.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,


(Drs. SOEMANTRI)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH SUSANTO, S.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(TEGUH SUSANTO, S.T.)

(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Domain dan Subdomain yang dikelola	Persentase domain dan sub domain yang telah dimanfaatkan	100%
2	Meningkatnya Layanan Akses Internet Publik	Persentase ruang publik yang terkoneksi internet	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.043.500.000	APBD
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.250.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,



(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSILO, S.Kom**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH SUSANTO, S.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,

(SUSILO, S.Kom)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyediaan akses informasi publik	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
		Persentase Media yang dimanfaatkan untuk Penyebaran Informasi	96,67%
2	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat dalam pengelolaan komunikasi publik	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.979.377.200	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,



(SUSILO, S.Kom)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH SUSANTO, S.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,

(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Tersedia	70%
2	Meningkatnya Pengamanan Berita yang Diterima	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	25%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 147.400.000	APBD
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.300.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(TEGUH SUSANTO, S.T.)

Pihak Pertama,



(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NISYARINAH, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SOEMANTRI**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


(**Drs. SOEMANTRI**)

Pihak Pertama,


(**NISYARINAH, S.Sos**)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen
2	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran dan persuratan	Persentase surat masuk dan surat keluar yang di kelola tepat waktu dan akuntabel	100 %
3	Terlaksananya perencanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian yang di sediakan	8 Layanan
4	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun	2 Laporan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengadaan Mebel	Rp. 49.924.600	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 31.500.000	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 92.139.500	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


(Drs. SOEMANTRI)

Pihak Pertama,


(NISYARINAH, S.Sos)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYARIFAH UMMI KALTSUM, S.E.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SOEMANTRI**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

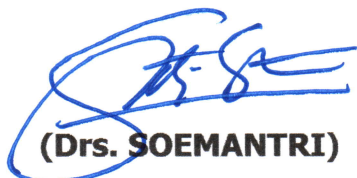
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


(Drs. SOEMANTRI)

Pihak Pertama,


(SYARIFAH UMMI KALTSUM, S.E.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang sesuai regulasi	4 dokumen
2	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Secara Berkala	Jumlah pelaporan yang tersusun secara berkala	16 laporan
4	Penyusunan dokumen capaian kinerja yang tepat waktu	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tepat waktu	2 dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.803.400	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


(Drs. SOEMANTRI)

Pihak Pertama,


(SYARIFAH UMMI KALTSUM, S.E.)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.T**

Jabatan : **PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

Pihak Pertama,

(MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.T)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 43.500.000	APBD
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 4.000.000.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

Pihak Pertama,



(MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.T)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JHON ANDASPRA, S.T**

Jabatan : **PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

Pihak Pertama,

(JHON ANDASPRA, S.T)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
2	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp. 43.700.000	APBD
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp. 106.550.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(SALMAN ALFARISY SORA, S.Kom)

Pihak Pertama,



(JHON ANDASPRA, S.T)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **S. PRIYANTO, S.E.**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUSILO, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,

(S. PRIYANTO, S.E.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen
2	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 25.753.200	APBD
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp. 26.499.000	APBD

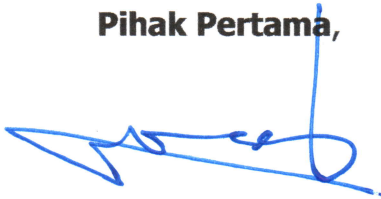
Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,



(S. PRIYANTO, S.E.)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WULAN TRIWAHYUNI, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUSILO, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,

(WULAN TRIWAHYUNI, S.Sos)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
2	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pelayanan Informasi Publik	Rp. 7.800.000	APBD
Layanan Hubungan Media	Rp. 143.130.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,

(WULAN TRIWAHYUNI, S.Sos)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZUHDY SYAFARA, S.IP**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUSILO, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,

(M. ZUHDY SYAFARA, S.IP)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
3	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp. 1.497.545.000	APBD
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 236.600.000	APBD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp. 42.050.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,



(SUSILO, S.Kom)

Pihak Pertama,



(M. ZUHDY SYAFARA, S.IP)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MISNANTEN, S.Kom**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

Pihak Pertama,

(MISNANTEN, S.Kom)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 147.400.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

Pihak Pertama,


(MISNANTEN, S.Kom)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHROJI, S.ST**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

Pihak Pertama,

(WAHROJI, S.ST)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 OPD

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.300.000	APBD

Tanjungpinang, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(RIRIN NOVIANA, S.Si., M.M)

(WAHROJI, S.ST)